

Penguatan *Ecological Citizenship* melalui Penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Masyarakat

Dedy Ari Nugroho

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Pos-el: dedyuns@gmail.com

Abstrak

Karya tulis ini mengkaji ilmu kewarganegaraan berbasis penelitian, tentang upaya penguatan *ecological citizenship* melalui penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis masyarakat. Konten karya ilmiah ini disajikan secara teoretik berdasarkan data hasil penelitian jenis deskriptif kualitatif dan ditunjang dengan studi kepustakaan, yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Adapun program pembangunan bidang ekologi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Karya ilmiah hasil penelitian ini dibuat sebagai refleksi atas isu kewarganegaraan, khususnya tentang permasalahan apatisme di masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup. Tantangan abad 21 bukan hanya pada sektor pembangunan ekonomi negara, tetapi juga pembangunan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran khas Indonesia yang memuat konten nilai-nilai Pancasila dengan salah satu outputnya adalah menjadikan generasi bangsa menjadi warga negara yang baik dengan tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa. Penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di abad 21 bukan hanya diperlukan dalam konteks kelas dan diajarkan serba teoretik saja, tetapi juga diterapkan di masyarakat sebagai implementasi dari teori yang diperoleh. Salah satu wahana penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat adalah berpartisipasi dalam kegiatan penyelamatan lingkungan hidup, atau dalam ilmu kewarganegaraan (*civics*) disebut juga *ecological citizenship*.

Kata kunci: *ecological citizenship*, Program Kota Tanpa Kumuh, PPKn, Masyarakat.

Pendahuluan

Indonesia dalam kerangka negara merdeka, meneguhkan diri sebagai negara yang majemuk. Indonesia terdiri dari pulau, suku, ras, dan agama yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsekuensi logis bagi dari kemajemukan negara Indonesia adalah negara rentan benturan kepentingan karena perbedaan tersebut. Indonesia harus memiliki kekuatan lebih untuk menangani permasalahan yang mungkin saja muncul dari adanya perbedaan. Salah satunya dengan membudayakan masyarakat Kesalehan sosial bangsa Indonesia, merupakan salah satu unsur yang mencirikan manusia Indonesia sesungguhnya. Kepedulian antar anggota masyarakat berlandaskan jiwa gotong royong adalah salah satu bentuk kesalehan sosial di masyarakat. Kepedulian masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang kehidupan yang membutuhkan kepedulian masyarakat adalah bidang penanggulangan lingkungan hidup (ekologi). Bidang penyelamatan lingkungan hidup merupakan salah satu agenda penting yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat. Di Indonesia, banyak dialokasikan program kebijakan yang dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup melalui kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan peluang yang luas bagi setiap masyarakat

untuk terlibat dalam berbagai kebijakan pembangunan lingkungan hidup (ekologi). Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta ke-mandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan, bahwa terdapat asas pengaturan desa, beberapa diantaranya adalah kegotongroyongan, partisipasi, dan pemberdayaan. Partisipasi yang tertera dalam pasal tersebut memberikan penguatan tentang pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan sehingga orientasi ke depan, partisipasi menjadi kunci keberhasilan berbagai program. Terutama di bidang penyelamatan lingkungan hidup (ekologi).

Penguatan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelamatan lingkungan hidup (ekologi), dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan yang tepat. Salah satunya, dapat dilakukan melalui penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya terbatas pada konteks

kelas dengan ulasan teori, tetapi juga semestinya perlu diteruskan pada tataran praktis melalui pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mempraktikkan teori yang diperoleh.

Untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam bidang ekologi (*ecological citizenship*) tidak bisa dilepaskan dari peran serta semua pihak. Pemerintah Daerah adalah salah satu unsur dalam pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengembangkan kapasitas masyarakat di bidang lingkungan hidup. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya kapasitas masyarakat selaras dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada Pasal 354 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam bidang pembangunan ekologi diperlukan rumusan serta strategi yang tepat guna. Merujuk pada pendapat Rahardjo (2011: 69), bahwa strategi mencakup langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk didalamnya pemberian tanggungjawab kepada setiap sumber daya dalam menentukan prioritas dan keberhasilan program.

Salah satu bidang kebijakan pemerintah bidang penyelamatan lingkungan hidup yang membutuhkan strategi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa Kumuh merupakan program yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, yang dikelola langsung oleh Ditjen Cipta Karya. Tujuan dari Program Kota Tanpa Kumuh adalah mewujudkan lingkungan, tata kelola perkotaan dan pedesaan yang sehat bagi masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Program Kota Tanpa Kumuh merupakan program nasional yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dikutip dalam laman *website www.solopos.com* dijelaskan bahwa Kawasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo tersebar di 32 desa/kelurahan di enam kecamatan seluas 202.654 hektar. Berdasarkan data kekumuhan kawasan tersebut, Kabupaten Sukoharjo menerima dana sebesar 3 triliun rupiah yang dialokasikan untuk menanggulangi kawasan tersebut.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Sukoharjo hendaknya dilakukan secara

partisipatif baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat umum sesuai dengan prinsip KOTAKU yaitu kolaboratif. Prinsip tersebut menegaskan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk berkolaborasi mewujudkan tatanan pemukiman sehat bagi masyarakat. Benton (2013: 221), berpendapat bahwa: "... *number of positive features that collaboration can produce and are as listed below: offers the opportunity for bottom-up approach to dealing with regional issues rather than a top-down approach*". Pendapat tersebut mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif sangatlah penting, karena memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.

Realita yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan berdasarkan data penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis tahun 2014 pada program yang sejenis, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat pada program pembangunan kawasan permukiman dan lingkungan masih belum banyak dilakukan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sukoharjo, masih sibuk dengan urusan pribadi di akhir pekan dan memilih membayar denda ketidakhadiran dari pada ikut berpartisipasi. Keadaan tersebut selaras dengan pendapat Malihah (2015:150) yang menyatakan tentang kondisi masyarakat Indonesia secara umum, bahwa saat ini masyarakat Indonesia cenderung individualis, sangat memprioritaskan kepentingannya, dan seolah kurang peduli dengan kepentingan umum.

Penjelasan di atas menjadi tantangan bersama, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan masyarakat untuk menanggulangnya. Strategi Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat merupakan formulasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut masalah keterlibatan masyarakat pada Program KOTAKU. Pemerintah Daerah harus lebih responsif dan memberi peluang pada masyarakat untuk terlibat (*bottom-up development*). Sejarah pembangunan yang dikendalikan mutlak oleh pemerintah (*top-down development*) terbukti menyisakan pengalaman buruk bagi bangsa Indonesia. Senada dengan pernyataan tersebut Rahardjo (2011:3-4), menyatakan bahwa manajemen pemerintah daerah yang dikendalikan, diatur, dan diarahkan dari pusat (*top-down development*), menimbulkan kecenderungan pemerintah daerah kurang motivasi, kurang kreatif, bahkan akan menimbulkan sikap apatis masyarakat. Masyarakat dari tingkat basis atau daerah perlu diberikan peluang untuk ikut serta berkontribusi dalam kebijakan pembangunan lingkungan hidup. Wahyuningsih (2012: 291) menyatakan bahwa masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan diberikan bimbingan berupa pendampingan supaya berhasil. Konteks kegiatan dalam hal ini adalah keterlibatan

masyarakat dalam bidang pembangunan di tingkat daerah. Sejalan dengan pendapat Wahyuningsing, Kukamba (2010:171) dalam *International Review of Administrative Science* menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mengupayakan sinergitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah daerah harus senantiasa membangun kapasitas masyarakat di tingkat daerah dengan cara memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai proses pembangunan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam karya ilmiah hasil penelitian ini penulis merasa perlu menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program penyelamatan lingkungan hidup (*ecological citizenship*). Keterlibatan masyarakat dalam program ekologi merupakan isu kewarganegaraan yang sedang banyak diperbincangkan karena menyangkut kontribusi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Karya Ilmiah hasil penelitian ini, memberikan penjelasan yang didasarkan pada dua rumusan masalah. *Pertama*, berkaitan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya menguatkan *ecological citizenship* masyarakat Kabupaten Suoharjo dalam Program KOTAKU. *Kedua*, berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU (bidang ekologi).

Karya tulis hasil penelitian ini memiliki dua tujuan utama sebagai hasil refleksi dari rumusan masalah di atas. *Pertama*, karya ilmiah ini mengkaji strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya menguatkan *ecological citizenship* masyarakat Kabupaten Suoharjo dalam Program KOTAKU. *Kedua*, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU, sebagai bentuk kontribusi di bidang ekologi (*ecological citizenship*).

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu, metode deskriptif sering disebut metode analisa.

Penelitian dalam karya ilmiah ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Beberapa alasan logis yang menjadi dasar dipilihnya tempat penelitian tersebut antara lain: *Pertama*,

penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian yang dilakukan di tahun 2014 tentang partisipasi masyarakat pada program yang sejenis. Data baru yang saat itu ditemukan adalah Pemerintah Daerah kurang proaktif dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas masyarakat pada program pembangunan, sehingga tahun 2017 penulis tertarik untuk meneliti kebenarannya melalui Program KOTAKU. *Kedua*, Kabupaten Sukoharjo memiliki Kawasan kumuh di Sukoharjo tersebar di 32 desa/kelurahan di enam kecamatan seluas 202.654 hektar, sehingga peneliti dapat melihat secara nyata implementasinya. Sedangkan, waktu penelitian dalam karya ilmiah ini dilakukan selama delapan bulan, dari bulan Februari 2017 sampai pada bulan Agustus 2017.

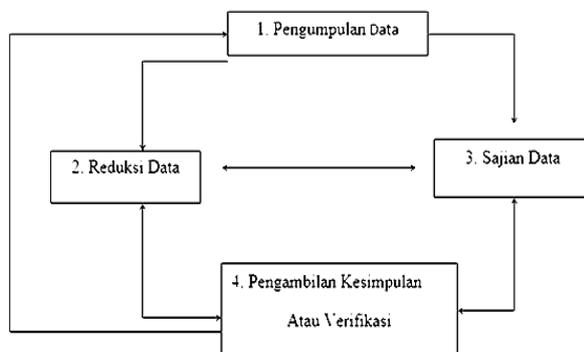
Sumber data dalam penelitian ini dapat bersifat kompleks, artinya dapat diperoleh dari beberapa sumber baik manusia ataupun fenomena itu sendiri yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Secara umum H.B Sutopo (2002:50-54) menyatakan bahwa "sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip". Secara spesifik sumber data dalam penelitian ini, berasal dari informan yang terdiri dari: Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pokja PKP Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari Kelurahan penerima manfaat di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Kelompok Swadaya Masyarakat yang dibentuk di masing-masing Kelurahan penerima manfaat, dan juga masyarakat umum. Sumber data selanjutnya berasal dari arsip dan dokumen yang berupa modul, perundang-undangan, dan angka statistik yang relevan dengan kajian penelitian. Sumber data terakhir berasal dari observasi kegiatan Program KOTAKU dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2010:125) *Snowball sampling* adalah: Teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan maka instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dan analisis dokumen.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Menurut H.B Sutopo (2002:78) berpendapat bahwa triangulasi data, adalah data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bisa digali dari beberapa

sumber data yang berbeda. Selain menggunakan triangulasi data, dalam menentukan keabsahan data dalam penelitian ini juga digunakan *informan review*. *Informan review* adalah “upaya pengembangan validitas data yang dilakukan dengan cara mengkomunikasikan unit-unit laporan yang telah disusun kepada informannya, khususnya yang dipandang sebagai informan pokok (*Key Informan*)”. (HB. Sutopo, 2002:83).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berkiblat pada pendapat H.B Sutopo (2002:91). H.B Sutopo (2002:91) berpendapat bahwa “dalam proses analisis data terdapat 4 komponen yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen tersebut antara lain: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) sajian data, dan 4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini secara terperinci dapat diamati dalam bagan berikut.



Gambar 1. Analisis data model H.B Sutopo
(Sumber: H.B Sutopo, 2002:91)

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya Penguatan Ecological Citizenship melalui Program KOTAKU

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menjalankan sistem pemerintahan dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan penguatan terhadap masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mau dan mampu berpartisipasi dalam program pembangunan lingkungan hidup (*ecological citizenship*). Program KOTAKU merupakan salah satu program pembangunan yang dialokasikan untuk mewujudkan lingkungan sehat bagi masyarakat. Program KOTAKU pada prinsipnya membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Prinsip kolaboratif dalam Program KOTAKU memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk terlibat dari tahap persiapan atau perencanaan sampai pada pemanfaat hasil pembangunan. Keberhasilan Program KOTAKU sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, oleh

karena itu sangat penting untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar mau dan mampu untuk berpartisipasi.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan kunci utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk berkontribusi dalam Program KOTAKU. Berdasarkan data hasil wawancara, data hasil pengamatan, dan studi dokumen diperoleh data tentang strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Strategi yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, secara terperinci dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Melaksanakan dialog interaktif dan pelatihan penyusunan profil kekomunitarian kawasan yang dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 dan 11 Februari tahun 2017 di Pendopo Kelurahan Sonorejo Kabupaten Sukoharjo.
2. Melaksanakan dialog interaktif dan pelatihan tentang pengembangan kapasitas masyarakat dalam Program KOTAKU. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2017 di Pendopo Kelurahan Sonorejo Kabupaten Sukoharjo.
3. Melaksanakan dialog interaktif dan pelatihan perencanaan partisipatif Program KOTAKU tahun 2017. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 April tahun 2017 di Rumah Makan Biru Sukoharjo.
4. Melaksanakan dialog interaktif dan pelatihan pengelolaan keuangan Program KOTAKU. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2017 di Pendopo Kelurahan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
5. Melaksanakan dialog interaktif dan pelatihan Badan Keswadayaan Masyarakat. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2017 di Pendopo Kelurahan Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo.
6. Melakukan peninjauan dan pendampingan pada proses pengambilan keputusan dalam forum Rembug Warga Tahunan (RWT).
7. Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat pada saat proses pembelanjaan bahan material bangunan untuk Program KOTAKU.
8. Melaksanakan pendampingan pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU.
9. Melaksanakan dialog evaluasi Program KOTAKU, yang meliputi evaluasi tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan.

Berdasarkan beberapa data temuan lapangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah

Daerah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan sejumlah dialog interaktif dan mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam Program KOTAKU. Dialog dan pelatihan merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan partisipasi atau kontribusi dalam program penanggulangan lingkungan hidup (ekologi). Berdasarkan data hasil pengamatan juga dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo begitu antusias mengikuti dialog dan pelatihan yang diselenggarakan. Data dari dokumen materi pelatihan dan modul juga memuat materi tentang pentingnya partisipasi dalam Program KOTAKU, motivasi untuk percaya diri mengikuti acara penyelamatan lingkungan hidup, dan materi teknis pelaksanaan program.

Data temuan lapangan yang diuraikan di atas, sesuai dengan teori siklus perencanaan strategi yang dirumuskan oleh Bryson (2004). Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo seharusnya dilakukan dengan menggunakan perencanaan yang matang, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Bryson (2004:7) menjelaskan tentang siklus perencanaan strategi yang dapat digunakan sebagai kerangka sehingga target strategi dapat tercapai. Bryson (2004) menamakan siklus perencanaan strateginya sebagai Perencanaan Strategi ABC. Secara terperinci, siklus perencanaan strategi ABC dapat diamati dalam gambar berikut.



Gambar 2. Siklus Perencanaan Strategi ABC
(Bryson, 2004:7)

Siklus perencanaan strategi menurut Bryson di atas, dapat menjadi acuan, pedoman, sekaligus bahan analisis terhadap strategi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menguatkan partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU. Namun, sebelum mempergunakan siklus tersebut sebagai bahan analisis, perlu dimaknai terlebih dahulu setiap siklus dalam gambar di atas. Merujuk pada Gambar 2 dapat diamati bahwa tahap A ke B merupakan penentuan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, tahap A ke C merupakan proses perumusan strategi, sedangkan

dari C ke B adalah implementasi strategi. Jika dibandingkan dengan konteks Program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan penyusunan visi, misi, dan tujuan program, dalam hal ini adalah Program KOTAKU. Berdasarkan data studi dokumen, profil, visi, misi, dan tujuan Program KOTAKU telah tercantum dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KOTAKU yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016. Program KOTAKU merupakan salah satu bagian dari Program Jangka Menengah tahun 2015-2019 kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Secara empiris, terbentuknya visi, misi, dan tujuan Program KOTAKU telah menjawab siklus A dalam teori Bryson (2004) di atas.

Berdasarkan wawancara dengan Sutanta dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Sukoharjo, serta dari hasil studi dokumen tentang profil Program KOTAKU, diperoleh informasi bahwa tujuan, struktur, sistem, serta kemampuan sumber daya telah dirumuskan dalam buku panduan dan pelaksana programnya juga telah ditentukan. Secara empiris informasi tersebut telah menjawab siklus tahap B dalam teori Bryson (2004). Sedangkan, untuk tahap C dalam teori Bryson (2004) menghendaki adanya strategic plan atau perencanaan strategi. Dari hasil wawancara dengan koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Koordinator Kota Program KOTAKU, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta observasi diperoleh data yang mengarah pada implementasi siklus C dalam teori Bryson (2004). Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan strategi yang direncanakan dalam bentuk dialog interaktif, pelatihan, dan pendampingan pada implementasi Program KOTAKU. Strategi yang telah diimplementasikan tersebut secara empiris telah menjawab siklus C dalam teori Bryson (2004). Implementasi pada siklus C, dibuktikan dengan hasil studi observasi dan wawancara di beberapa acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, misalnya pada pelaksanaan dialog dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di Pendopo Kelurahan Sonorejo Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai kegiatan yang selaras dengan teori Bryson (2004). Berbagai kegiatan di atas, dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Program KOTAKU khususnya, dan bagi lingkungan hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan data temuan lapangan tentang strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada uraian sebelumnya, memiliki kecenderungan untuk melakukan pendekatan interaktif secara massal. Berdasarkan

hasil wawancara ada berbagai alasan dipilihnya strategi dengan pendekatan interaktif massal, antara lain:

1. Memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara detail melalui forum yang dihadiri langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Efisien waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak memerlukan banyak waktu untuk dialokasikan pada masyarakat saat melaksanakan kegiatan dialog secara massal. Berbeda dengan pelaksanaan secara intensif satu demi satu pihak, akan memerlukan banyak waktu, dan di sisi lain waktu pelaksanaan semakin dekat.
3. Efektif, kegiatan yang dilakukan secara massal dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat dirasa lebih efektif dalam menjangkau keluhan, hambatan, serta berbagai persoalan yang belum dimengerti oleh masyarakat terkait Program KOTAKU. Terbukti pada saat pelaksanaan dialog banyak masyarakat yang aktif bertanya dan menguatkan satu sama lain.

Beberapa alasan di atas menjadi faktor diselenggarakannya forum dialog secara interaktif dan massal. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memerlukan manajemen waktu yang tepat, sehingga jadwal kegiatan yang telah ditentukan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dapat terselenggara dengan tepat waktu. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) juga melakukan manajemen materi yang disampaikan dalam acara dialog, sosialisasi, dan pelatihan, sehingga maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan dapat tercapai. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi untuk memberikan penguatan terhadap partisipasi masyarakat pada program pembangunan ekologi, sehingga materi yang disampaikan harus dimanajemen sesuai dengan konteks yang ingin dicapai.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam program KOTAKU merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap lingkungan hidup (*ecological citizenship*). Setelah mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam upaya menguatkan partisipasi masyarakat pada Program bidang ekologi, penting juga mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU yang merupakan program bidang ekologi. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan hidupnya, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga

mengembangkannya agar ramah terhadap masyarakat yang ada di tempat tersebut.

Program KOTAKU diimplementasikan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan lingkungan hidup agar jauh dari kekumuhan lingkungan yang akan mendatangkan banyak penyakit. Kontribusi masyarakat umum merupakan kunci utama keberhasilan Program KOTAKU. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), dan juga studi dokumen diperoleh data tentang bentuk partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU. Berikut adalah data tentang bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada Program KOTAKU.

1. Berbagai elemen masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan sosialisasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Pendopo Kabupaten Sukoharjo hari Kamis, tanggal 8 September 2016.
2. Berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pembuatan profil kekumuhan daerah di masing-masing kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini berlangsung setelah sosialisasi Program KOTAKU telah selesai dilakukan. Di setiap kelurahan dibentuk pendamping program atau fasilitator yang mengawal proses implementasi Program KOTAKU.
3. Berbagai elemen masyarakat, memberikan saran dan mengusulkan prioritas infrastruktur yang akan dibangun untuk menanggulangi lingkungan kumuh, dalam forum Rembug Warga Tahunan (RWT). Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas program adalah data profil kekumuhan yang sebelumnya disusun.
4. Masyarakat terlibat aktif memberikan bantuan tenaga, pikiran, dan materi dalam pelaksanaan Program KOTAKU.
5. Beberapa masyarakat memberikan makanan dan minuman secara suka rela pada saat pelaksanaan Program KOTAKU untuk konsumsi masyarakat yang berpartisipasi.
6. Berbagai elemen masyarakat membuat jadwal terstruktur setiap RT sehingga setiap hari ada masyarakat yang ikut serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU.

Berdasarkan beberapa data temuan lapangan di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sukoharjo masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup (ekologi) melalui Program KOTAKU dengan berbagai bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo di atas secara terperinci dapat diklasifikasikan menjadi bentuk partisipasi secara materi dan non materi.

Pembahasan yang berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU dapat diketahui dengan mendasarkan data teuan lapangan pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori dari Mardikanto yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan dalam empat tahapan, antara lain: tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan, tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, tahap partisipasi dalam tahap evaluasi hasil kegiatan, dan tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan.

Pembahasan dalam konteks bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat diklasifikasi menggunakan teori Mardikanto (2010). Namun, pada pembahasan ini akan dilihat bentuk partisipasi pada dua tahap awal yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dan pelaksanaan merupakan tahap paling mendasar dalam pembangunan lingkungan hidup. Berdasarkan tahapan yang dijelaskan oleh Mardikanto dan data temuan lapangan yang diperoleh maka pembahasan bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan dapat dicermati dalam uraian berikut.

1. Bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo melakukan partisipasi dalam bentuk non materi. Bentuk partisipasi yang dimaksud dapat dilihat dari hasil pengamatan bahwa banyak masyarakat terlibat aktif menyampaikan ide dan gagasan yang berkaitan dengan Program KOTAKU. Ide dan gagasan tersebut banyak disampaikan pada forum pelatihan bagi masyarakat yang diadakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). Selain itu, masyarakat juga memberikan kontribusi tenaga dan pikiran pada saat menyusun profil kekumuhan kawasan. Profil kekumuhan kawasan disusun berdasarkan database yang disusun sendiri oleh masyarakat melalui isian kolom yang disediakan oleh fasilitator. Masyarakat memberikan skor ataupun mencentang kolom tentang drainase, keadaan jalan, sampah, dan lain sebagainya. *Output* dari profil itu adalah tersusunnya data kekumuhan berdasarkan prioritas, yang kemudian dapat diketahui sarana apa saja yang menjadi kebutuhan paling mendesak di kawasan tersebut. Misalnya di Kelurahan Sonorejo Kabupaten Sukoharjo dibangun Tempat Pengelolaan Akhir (TPA), karena sampah menjadi persoalan di kawasan tersebut.

Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk ide dalam menyusun jadwal gotong royong bagi masyarakat di setiap RT. Penjadwalan tersebut di buat sebagai refleksi kesibukan masyarakat yang beragam di dalam masyarakat, ada yang sibuk dengan waktu bekerja dan lain sebagainya. Dengan pembagian jadwal gotong

royong tersebut di satu sisi memberi peluang masyarakat untuk terlibat, dan di sisi yang lain memberikan peluang masyarakat untuk tetap bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga, agenda gotong royong Program KOTAKU tidak mengorbankan kepentingan lain yang menyangkut penghidupan keluarga.

2. Bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Program KOTAKU masyarakat Kabupaten Sukoharjo menunjukkan partisipasi dengan bentuk yang lebih beragam jika dibandingkan dengan tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan Program KOTAKU masyarakat memberikan bentuk partisipasi materi dan non materi. Bentuk partisipasi secara materi diberikan melalui pemberian makanan pada saat pelaksanaan Program KOTAKU secara suka rela. Bahkan di Kelurahan Sonorejo, dan Kelurahan Sukoharjo masyarakat secara bergiliran memberikan makanan secara terjadwal berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri.

Bentuk partisipasi non materi dalam tahap pelaksanaan dilakukan dengan terlibat dalam Program KOTAKU melalui agenda gotong royong. Partisipasi dalam agenda gotong royong merupakan bentuk partisipasi tenaga yang dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian infrastruktur Program KOTAKU. Pada tahap pelaksanaan masyarakat juga tetap memberikan gagasan di tengah pelaksanaan dengan cara mengarahkan partisipan ketika melakukan kesalahan. Masyarakat yang terlibat dalam agenda gotong royong juga melakukan plotting sesuai dengan kemampuan masing-masing, terdapat masyarakat yang terbiasa dengan aktivitas pembangunan diarahkan untuk menjadi komando dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam tahap pelaksanaan bentuk partisipasi ide atau gagasan tetap ada.

Kesimpulan

Berdasarkan data temuan dan juga pembahasan pada bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan selaras dengan rumusan masalah yang dikaji, adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut.

1. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya penguatan *ecological citizenship* melalui Program KOTAKU direncanakan secara terpadu dengan menyelenggarakan dialog, sosialisasi, dan pelatihan. Dialog interaktif, sosialisasi, dan pelatihan dilakukan dengan misi mengenalkan serta melatih kepedulian masyarakat untuk ambil bagian dalam program pembangunan lingkungan hidup (ekologi). Program KOTAKU merupakan salah satu program di bidang pengendalian ekologi yang dilaksanakan di Kabupaten Suko-

harjo, sehingga dalam program ini dapat dilihat strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kapasitas atau partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan dialog yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang posisi strategis mereka dalam Program KOTAKU. Sehingga dengan dialog, pelatihan, dan sosialisasi masyarakat akan mau, tahu, dan mampu ikut serta dalam Program KOTAKU.

2. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berkontribusi dalam bentuk materi dan non materi pada saat ikut serta Program KOTAKU. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berkontribusi pada beberapa tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo berkontribusi dalam bentuk non materi yaitu dalam wujud ide dan gagasan. Masyarakat memberikan ide dan gagasan pada forum dialog, sosialisasi, dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu dalam tahap perencanaan masyarakat terlibat dalam memberi ide dan gagasan dalam menyusun profil kekumuhan kawasan yang kemudian datanya akan dijadikan acuan menentukan prioritas infrastruktur yang dibangun. Pada tahap pelaksanaan masyarakat banyak terlibat dalam memberikan bentuk partisipasi baik materi maupun non materi. Partisipasi dalam bentuk materi diberikan dalam wujud makanan dan minuman yang diberikan secara sukarela untuk kepentingan gotong royong, sedangkan bantuan non materi adalah tenaga, ide, dan gagasan pada saat proses gotong royong berlangsung.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penting dijadikan perhatian bersama bahwa setiap lapisan bangsa mulai dari pemerintah sampai pada masyarakat umum dapat bersinergi untuk mewujudkan keberhasilan program. Dalam penelitian ini program KOTAKU dapat dilakukan dengan baik selaras tujuan yang akan dicapai. Pencapaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan masyarakat umum.

Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan untuk yang pertama dan yang paling utama kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih, sampai hari ini selalu diberikan kesempatan berkarya. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ayah tercinta, yang memberikan untaian kata-kata pengobar semangat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Suharno, M.Si yang bersedia meluangkan waktunya untuk

membimbing karya-karya penulis. Serta tidak lupa kawanku dan sahabatku, mahasiswa Pascasarjana UNY Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2016.

Daftar Pustaka

- Benton, J. E. (2013). *Local Government Collaboration: Considerations, Issues, and Prospects*. *State and Local Government Review* Vol. 45, No.4, pp. 220-223
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic planning for public and nonprofit organization: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. United States of America: HB Printing
- Eko, B. (2017). *Kementerian PUPR kururkan 3 Miliar untuk penanganan kawasan kumuh di Sukoharjo*. <http://www.solopos.com/2017/08/05/kementerian-pupr-kururkan-rp3-miliar-untuk-penanganan-kawasan-kumuh-sukoharjo-840369>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 11.20 WIB
- Kukamba, U. (2010). *Local government citizen participation and rural development: reflection on uganda's decentralization system*. *International Review of Administrative Science*, Vol. 76, Number 1, pp. 171-186
- Malihah, E. (2015). *An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 'Golden Indonesia'*. *Citizenship, Social & Economics Education*, Vol. vol. 14, 2: pp. 148-156
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-konsep Pemberdayaan masyarakat (acuan bagi aparat birokrasi, akademisi, praktisi, dan peminat/pemerhati pemberdayaan masyarakat)*. Surakarta: UNS Press
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, HB. (2002). *Metodologi penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuningsih, R. D, dkk. (2012). *Publik governance*. Surakarta: UNS press